

KATA PENGANTAR

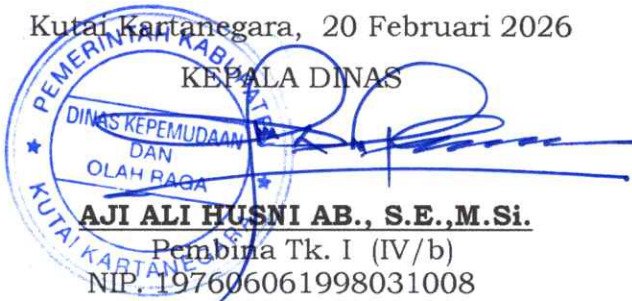
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS



AJI ALI HUSNI AB., S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197606061998031008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bentuk implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan dan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator tambahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,34	0,73	213
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,31	0,52	167

3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,87	2,67	55
4	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	4,77	4,61	97
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Medali Emas	8	41,00	513
6	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	14,36	48,44	337
7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	0,00	0
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	89,64	102
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100,00	100,00	100
10	aturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,83	128
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1,00	100

12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100,00	100
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100,00	100
14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48,00	100
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,70	3,26	88
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	86
17	Meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110
18	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	59,41	59

19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	96
						134

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebesar 134%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja "SANGAT TINGGI".

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vii
Lampiran.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja.....	15
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	39
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Perbaikan Kedepan.....	53

LAMPIRAN :

	Halaman
Struktur dan bagan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara	5
Tabel 2.1 Matrik hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	7
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	9
Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
Tabel 2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Data awal Tahun Renstra dan Target Tahun 2025.....	13
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Realisasi kinerja Sebelumnya.....	26
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	29
Tabel 3.5 Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel 3.6 Capaian kinerja Program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis.....	38
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2025.....	39
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya (2024).....	45
Grafik Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai tahun 2025.....	30

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 76,59%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	SILPA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64.114.409.451	46.628.968.125	72,73	17.485.441.326
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	522.940.400	301.021.020	57,56	221.919.380
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	180.600.537	60,20	119.399.463
2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.636.000	67.980.483	83,27	13.655.517
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.909.400	28.530.000	98,69	379.400
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100.000.000	15.050.000	15,05	84.950.000
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.395.000	8.860.000	71,48	3.535.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12.796.634.637	11.633.140.793	90,91	1.163.493.844
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.847.448.484	10.823.432.484	91,36	1.024.016.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	643.634.153	624.174.152	96,98	19.460.001
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	280.552.000	182.504.157	65,05	98.047.843

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kepemudanaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan Olah Raga;
2. Pelaksanaan Program kerja dan administrasi di Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
3. Pelaksanaan pengawasan, Monitoring dan evaluasi di Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
4. Penyusunan laporan di Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

1. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi kebijakan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
2. Masih rendahnya kualitas dan keterampilan (keahlian) pemuda;
3. Masih terbatasnya jumlah pemuda yang mempunyai ketrampilan atau skill tertentu;
4. Rendahnya minat masyarakat terhadap Olahraga;
5. Rendahnya ketersediaan Sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

1.4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) bagi generasi muda menjadi generasi mandiri;
2. Peningkatan kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda;
3. Peningkatan budaya olahraga dimasyarakat dan prestasi olah raga;
4. Peningkatan pendidikan, pengembangan, pemasyarakatan kependuan;
5. Penguatan SDM kepemudaan dan keolahragaan;

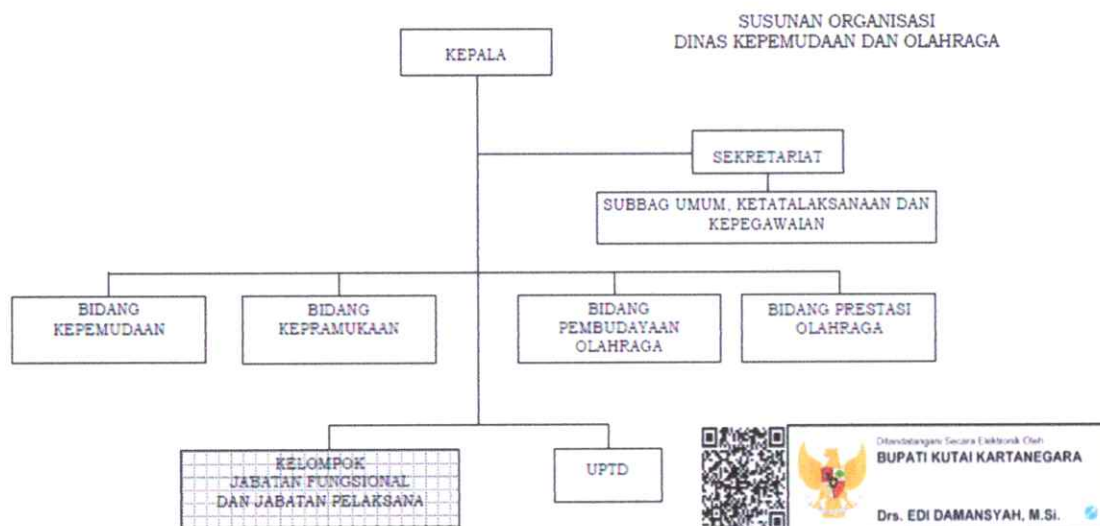
6. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan;
7. Penguatan dan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Sekretariat 1 (Satu) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut :

1. Sekretaris membawahi :
Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
2. Bidang Kepemudaan.
3. Bidang Kepramukaan.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga.
5. Bidang Prestasi Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kompleks Olahraga.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Misi ke-1 dan 2 antara lain Misi Pertama yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani, selanjutnya Misi ke Dua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani			Meningkatnya Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi
	Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga
			Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga
	Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda	Cakupan pembinaan kepramukaan	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Penunjang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga;
3. Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship;
4. Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan;

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Laporan kinerja ASN
		Konsistensi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peningkatan layanan dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pemerintah daerah
2	Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Peningkatan Pembinaan pada usia didik dan penyediaan Sarana Prasarana Olahraga
		Peningkatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan
		Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan dan pengembangan IPTEK Keolahragaan
		Peningkatan Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Keolahragaan
		Pengembangan Olahraga Masyarakat (Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) serta Penyediaan sarana prasarana Olahraga Masyarakat
3	Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship	Peningkatan pengembangan potensi Pemuda, penyediaan Sarana Prasarana Serta Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepemudaan
		Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan dalam pengembangan potensi daerah yang maju dan berbudaya Serta Kemitraan dengan dunia usaha
4	Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan	Peningkatan SDM, Pembinaan Gugus depan dan satuan karya, Penyediaan Sarana Prasarana Serta Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	
Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Persentase Kepramukaan dan Anggota Aktif	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,34	Jumlah pemuda yg dibina / jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kukar x 100
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,31	Jumlah pemuda dalam keg. Ekonomi mandiri / jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kukar x 100
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,87	Jumlah pemuda yg berorganisasi / jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kukar x 100
4	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	4,77	(Jumlah atlit yg bina + partisipasi masyarakat dalam berolahraga) / jumlah masyarakat kukar x 100
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Medali Emas	8	Jumlah medali emas yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional
6	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	14,36	Jumlah Gudep yg aktif / jumlah gudep sekukar x 100

7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	• Melaksanakan, melaporkan dan menindaklanjuti hasil FKP = 100%• - Melaksanakan tapi tidak melaporkan, namun menindaklanjuti hasil FKP = 75%• - Melaksanakan, dan melaporkan, tidak menindaklanjuti hasil FKP= 50%• - Melaksanakan, tidak melaporkan dan tidak menindaklanjuti hasil FKP= 25%• - Tidak melaksanakan= 0%
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100,00	
10	aturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	
12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	
14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,70	
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	

17	Meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	
18	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	
19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA AWAL (2021)	TARGET 2025	TARGET AKHIR RENSRA 2026
1	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0.17	0,34	0.35
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0.27	0,31	0.32
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4.78	4,87	4.89
4	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	2.04	4,77	5.45
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Medali Emas	5	8	9
6	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	9.63	14,36	15.61
7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	n/a	100	

8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	n/a	88,30	
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	n/a	100,00	
10	aturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	n/a	3	
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	n/a	1	
12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	n/a	100	
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	n/a	100	
14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	n/a	48	
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	n/a	3,70	
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	n/a	77	
17	Meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	n/a	65	
18	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	n/a	6,97	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. **Tingkat Realisasi Positif**

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 sebesar 134% Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,34	0,73	213	Sangat Tinggi
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,31	0,52	167	Sangat Tinggi
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,87	2,67	55	Rendah
4	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	4,77	4,61	97	Sangat Tinggi
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Medali Emas	8	41,00	513	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	14,36	48,44	337	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	0,00	0	Sangat Rendah
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	89,64	102	Sangat Tinggi
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi

10	aturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,83	128	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1,00	100	Sangat Tinggi
12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100,00	100	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100,00	100	Sangat Tinggi
14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48,00	100	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,70	3,26	88	Tinggi
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	86	Tinggi
17	Meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	59,41	59	Rendah
19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	96	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja					134	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Pembinaan Kepemudaan

Target kinerja tahun 2025 sebesar 0,34 dan realisasinya 0,73 atau capaian kinerja sebesar 213% (*Laporan Kegiatan Tahun 2025*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{1.530 \text{ orang}}{210.906 \text{ orang}} \times 100 = 0,73\%$$

$$\frac{0,76}{0,34} \times 100 = 213\%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang dibina di bagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Jumlah Pemuda yang dibina pada tahun 2025 sebanyak 1.530 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2025.
3. Pemuda usia 16 s/d 30 tahun yang ada diKabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 210.906 orang, sumber data : DKB semester II tahun 2025 disdukcapil.

Hal yang mendukung terhadap capaian kinerja tersebut adalah adanya intensnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan para pemuda yang ada di kecamatan dan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga mereka terbuka wawasannya

- 2) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Target kinerja tahun 2025 sebesar 0,31, realisasinya 0,52 dan capaian kinerja sebesar 167%. Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{1091 \text{ orang}}{210.906 \text{ orang}} \times 100 = 0,52\%$$

$$\frac{0,52}{0,31} \times 100 = 167\%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah pemuda (16-30) yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi jumlah pemuda usia 16-30 Tahun seKabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Pemuda yang berwirausaha di kabupaten pada tahun 2025 sebanyak 1091 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2025.
3. Pemuda usia 16 - 30 tahun yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 210.906 orang sumber data : DKB semester II tahun 2025 disdukcapi.

Faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap capaian kinerja tersebut antara lain :

- a. Faktor percaya diri yang tinggi mempengaruhi minat pemuda untuk berwirausaha.
- b. Faktor semangat yang tinggi juga mempengaruhi minat pemuda dalam berwirausaha.

- 3) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Target kinerja tahun 2025 sebesar 4,87 dan realisasinya 2,67 atau capaian kinerja sebesar 55% (*Laporan Kegiatan Tahun 2025*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Rendah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{5.641 \text{ orang}}{210.906 \text{ orang}} \times 100 = 2,67\%$$

$$\frac{2,67}{4,87} \times 100 = 55\%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah pemuda usia 16-30 yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda usia 16-30 di Kabupaten x 100
2. Pemuda usia 16-30 yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten pada tahun 2025 sebanyak 5.641 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2025.
3. Pemuda usia 16-30 tahun yang ada dikukar berjumlah 210.906 orang sumber data : DKB semester II tahun 2025 disdukcapil.

4) Persentase Masyarakat yang Berolahraga

Target kinerja tahun 2025 sebesar 4,77 dan realisasinya 4.61 atau capaian kinerja sebesar 91%. Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi.

$$\frac{37.549 \text{ orang}}{813.926 \text{ orang}} \times 100 = 4.61 \%$$

$$\frac{4,61}{4,77} \times 100 = 91\%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah masyarakat yang berolahraga dibagi jumlah masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Masyarakat yang berolahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sebanyak 37, 549 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2025.
3. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berjumlah 813.926 orang, sumber data : DKB semester II tahun 2025 disdukcapil.

5) Jumlah Prestasi Olahraga

Target kinerja tahun 2025 sebanyak 8 medali Emas dan realisasinya 41 medali emas atau capaian kinerja sebesar 513%. Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.

$$\frac{41}{8} \times 100 = 513\%$$

Hal hal yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Meningkatnya kegiatan Kompetisi atau Kejuaran-kejuaraan pada tahun 2025 baik yang bersifat multi event ataupun single event yang berskala nasional ataupun internasional.
2. Meningkatnya kemampuan atlet baik ditingkat nasional dan internasional.

6) Cakupan organisasi kepramukaan yang aktif.

Target kinerja tahun 2025 sebesar 14,36 dan realisasinya 48,44 atau capaian kinerja sebesar 337% (*Laporan Kegiatan Tahun 2025*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi.

$$\frac{405}{836} \times 100 = 48,44\%$$

$$\frac{48.44}{14,36} \times 100 = 337\%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah gugus depan (Gudep) yang aktif dibagi jumlah gugus depan di Kabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Jumlah gugus depan yang aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sebanyak 405, sumber data : Kwarcab Kukar tahun 2025.
3. Jumlah seluruh gudep di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berjumlah 836 gudep, sumber data : Kwarcab Kukar tahun 2025.

- 7) Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP).
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga telah melaksanakan forum konsultasi publik bersama stakeholder yaitu organisasi keolahragaan dan organisasi Kepemudaan.
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai indeks kepuasan masyarakat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tahun 2025 yaitu 88.30.
- 9) Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya.
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga sudah 71% menindaklanjuti hasil temuan dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2025.
- 10) Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah
Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun Periode penilaian 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025 pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan memperoleh nilai 3.83 dengan kategori tingkat maturitas terdefinisi.
- 11) Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
Optimalisasi pelayanan keolahragaan dengan implementasi Siperaga (Sistem penyewaan Sarana dan Prasarana Olahraga).
- 12) Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
Terdapat 1 pengaduan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- 13) Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga telah 100% menyelesaikan input pada Satu Data Indonesia.

- 14) Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Telah melaksanakan Gerakan Etam Mengaji Tahun 2025.
- 15) Nilai LPPD
Nilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 3,26 artinya 88% kinerja tercapai dari target yang ditetapkan.
- 16) Nilai SAKIP Kabupaten
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan Tahun 2025 diperoleh nilai 65,92 dengan kategori B (Baik).
- 17) Indeks RB Kabupaten
Nilai Indeks RB Kabupaten Tahun 2025 adalah 71,51
- 18) Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah
Persentase Capaian IKK Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2025 adalah 80,74%.
- 19) Presentase Angka Kemiskinan
Presentase Angka Kemiskinan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 6,72%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 134%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 129%. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 5%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025			KET
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,33	0,51	154,98	0,34	0,73	213,37	Meningkat
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,30	0,33	110,55	0,31	0,52	166,87	Meningkat
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,84	5,03	103,94	4,87	2,67	54,92	Menurun
4	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	4,04	3,81	94,40	4,77	4,61	96,72	Meningkat
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	7	8	114,29	8	41	512,50	Meningkat

6	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	13,11	89,16	680,19	14,36	48,44	337,36	Menurun
7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	100,00	85,00	85,00	88,30	89,64	101,52	
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	71,00	71,00	
10	aturlas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	100,00	100,00	100,00	3	3,83	127,67	
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1,00	100,00	1	1,00	100,00	
12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	

14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan				48	48,00	100,00	
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,60	3,10	86,11	3,70	3,26	88,02	
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73	65,92	90,30	77	65,92	85,61	
17	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	64	64,00	100,00	65	71,51	110,02	
18	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100,00	100,00	100	59,41	59,41	
19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	0,00	0,00	0,00	6,97	6,72	96,41	
						129			134	

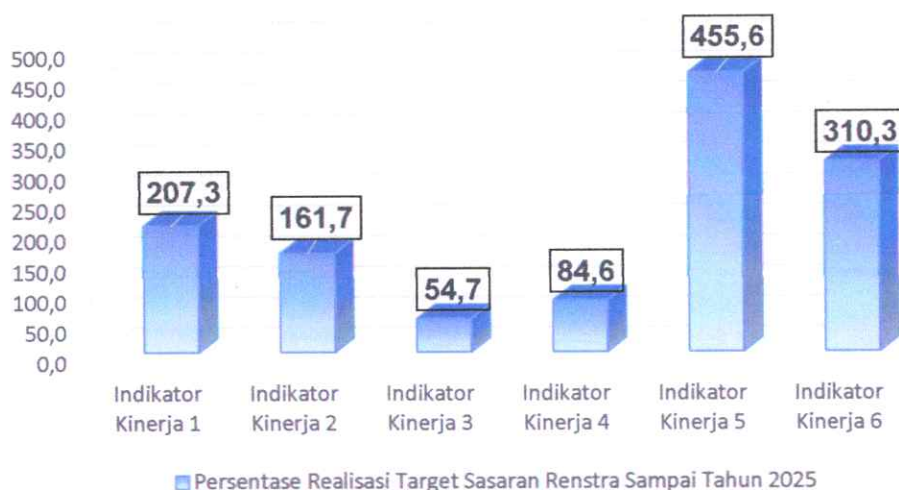
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2026	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja 1	0.35	0.76	213
Persentase Pembinaan Kepemudaan	Indikator Kinerja 2	0.32	1.46	167
Persentase Pemuda Mandiri	Indikator Kinerja 3	4.89	5.49	55
Persentase Pemuda yang Berorganisasi	Indikator Kinerja 4	5.45	4.60	97
Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Indikator Kinerja 5	9	37	513
Jumlah Prestasi Olahraga	Indikator Kinerja 6	15.61	48.44	337

Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025



3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi %	Ket
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	213	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	121	

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	167	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	74	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	55	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	-38	
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	97	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	77	20	
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	513	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	77	435	
Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	337	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	79	258	

Terjadinya inefisiensi pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan pada sasaran strategis peningkatan prestasi olahraga disebabkan karena kegiatan yang di targetkan adalah kegiatan/event tingkat nasional dan internasional dimana kegiatan/event tersebut diadakan satu kali dalam empat tahun. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada capaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan antara lain:

8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula. Didalam kegiatan ini

ada KLINIK WPM Kepanjangan dari Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri yaitu tempat pelayanan yang membantu para pemuda (usia 16 s/d 30 tahun) dalam mendirikan, menjalankan, mengembangkan usaha agar menjadi pemuda yang mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja.

Bidang layanan klinik wpm adalah :

1. Bidang Pelayanan Data Dan Informasi
2. Bidang Pelatihan Dan Pendampingan
3. Bidang Kerjasama Dan Pengembangan
4. Bidang Promosi

KEGIATAN EDUKASI TENTANG KEWIRAUSAHAAN



KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN



KEGIATAN ENTERPENEUR CAMP



9. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berisikan Binlat Casis POLRI dan Casis TNI AD, Maksud dan tujuan Binlat Casis TNI-POLRI dilaksanakan yaitu selain mengurangi angka tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan adanya binlat bisa meningkatkan jumlah minat dan juga kelulusan khususnya bagi putra putri asli daerah untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI-POLRI.

KEGIATAN BINLAT CALON



BINLAT CASIS TNI AD



10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

PELATIHAN BARISTA DAN BARBER SHOP



2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

PENINGKATAN KAPASITAS PELATIH TENIS MEJA



PENINGKATAN KAPASITAS PELATIH SEPAK BOLA



5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas kepramukaan antara lain:

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan



Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	0.34	0.73	213	Keberhasilan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0.31	0,52	167	Keberhasilan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		4.87	2,67	55	Keberhasilan
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan	4.77	4,61	97	Keberhasilan
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga		8	41	512	Keberhasilan
Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	14.36	48.44	337	Keberhasilan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 76,59%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	SILPA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64.114.409.451	46.628.968.125	72,73	17.485.441.326
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	522.940.400	301.021.020	57,56	221.919.380
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	180.600.537	60,20	119.399.463
2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.636.000	67.980.483	83,27	13.655.517
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.909.400	28.530.000	98,69	379.400
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100.000.000	15.050.000	15,05	84.950.000
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.395.000	8.860.000	71,48	3.535.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12.796.634.637	11.633.140.793	90,91	1.163.493.844
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.847.448.484	10.823.432.484	91,36	1.024.016.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	643.634.153	624.174.152	96,98	19.460.001
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	280.552.000	182.504.157	65,05	98.047.843

9	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	3.030.000	12,12	21.970.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	30.000.000	27.100.000	90,33	2.900.000
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	27.100.000	90,33	2.900.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	114.836.000	45.798.000	39,88	69.038.000
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.677.200	9.134.000	72,05	3.543.200
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11.677.200	8.434.000	72,23	3.243.200
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.481.600	28.230.000	31,20	62.251.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.632.944.000	6.012.229.129	56,54	4.620.714.871
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70.000.000	62.023.000	88,60	7.977.000
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.270.000.000	1.252.962.669	98,66	17.037.331
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45.000.000	43.976.000	97,72	1.024.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.000.000	82.160.000	82,16	17.840.000
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	295.000.000	277.501.850	94,07	17.498.150
19	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	68.866.000	65.970.000	95,79	2.896.000
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35.000.000	32.615.200	93,19	2.384.800
21	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.078.000	180.210.380	97,90	3.867.620
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	39.778.992	88,40	5.221.008

23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.520.000.000	3.975.031.038	46,66	4.544.968.962
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	11.564.994.030	11.209.547.845	96,93	355.446.185
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.264.994.030	1.188.500.000	93,95	76.494.030
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8.100.000.000	7.957.032.633	98,23	142.967.367
26	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	2.200.000.000	2.064.015.212	93,82	135.984.788
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	5.235.290.149	4.890.397.354	93,41	344.892.795
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.000.000.000	3.812.606.363	95,32	187.393.637
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.235.290.149	1.077.790.991	87,25	157.499.158
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	23.216.770.235	12.509.733.984	53,88	10.707.036.251
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300.000.000	296.377.456	98,79	3.622.544
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60.000.000	59.260.000	98,77	740.000
32	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.740.727.235	11.076.446.603	50,95	10.664.280.632
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.116.043.000	1.077.649.925	96,56	38.393.075
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	13.851.830.218	12.820.224.808	92,55	1.031.605.410

	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	10.096.714.350	9.591.933.026	95,00	504.781.324
34	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1.826.060.000	1.800.448.365	98,60	25.611.635
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	895.187.800	849.366.360	94,88	45.821.440
36	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	289.060.000	268.895.000	93,02	20.165.000
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.131.435.000	1.061.098.000	93,78	70.337.000
38	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	636.610.000	611.667.000	96,08	24.943.000
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	454.099.600	400.285.080	88,15	53.814.520
40	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4.864.261.950	4.600.173.221	94,57	264.088.729
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	3.755.115.868	3.228.291.782	85,97	526.824.086

41	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.755.115.868	3.228.291.782	85,97	526.824.086
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	49.113.429.856	37.849.928.883	77,07	11.263.500.973
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	17.037.001.233	13.419.313.148	78,77	3.617.688.085
42	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	17.037.001.233	13.419.313.148	78,77	3.617.688.085
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	16.816.123.007	12.980.104.831	77,19	3.836.018.176
43	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6.350.990.000	5.947.423.145	93,65	403.566.855
44	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	200.000.000	198.490.000	99,25	1.510.000
45	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10.265.133.007	6.834.191.686	66,58	3.430.941.321
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	4.983.330.000	2.147.470.728	43,09	2.835.859.272
46	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	15.000.000	14.410.000	96,07	590.000

47	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.466.500.000	13.410.000	0,54	2.453.090.000
48	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.810.784.000	1.764.330.728	97,43	46.453.272
49	Pembinaan dan Pengembangan olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	691.046.000	355.320.000	51,42	335.726.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	837.200.600	792.245.645	94,63	44.954.955
50	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	217.000.000	172.634.500	79,56	44.365.500
51	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	620.200.600	619.611.145	99,90	589.455
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	9.439.775.016	8.510.794.531	90,16	928.980.485
52	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.083.501.000	1.058.491.789	97,69	25.009.211
53	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4.480.482.700	4.129.305.592	92,16	351.177.108
54	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	87.020.000	81.053.076	93,14	5.966.924
55	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3.788.771.316	3.241.944.074	85,57	546.827.242
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan	1.607.427.320	1.268.199.388	78,90	339.227.932

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	1.607.427.320	1.268.199.388	78,90	339.227.932
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	95.585.000	33.136.000	34,67	62.449.000
57	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	92.200.000	92.200.000	100,00	-
58	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	158.800.000	111.148.400	69,99	47.651.600
59	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	76.797.600	64.564.200	84,07	12.233.400
60	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	561.124.120	509.261.920	90,76	51.862.200
61	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	110.884.800	95.901.100	86,49	14.983.700
62	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	512.035.800	361.987.768	70,70	150.048.032
	JUMLAH		128.687.096.845	98.567.321.204	76,59	30.119.775.641

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 84%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2024)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI KEU (%)	SISA ANGGARAN
						SILPA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	32.451.019.632	19.931.028.355	61,42	13.033.669.915
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	759.870.400	83.479.545	10,99	676.390.855

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	321.775.600	69.714.545	21,67	252.061.055
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.154.400	-	-	35.154.400
3	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.636.000	13.765.000	16,86	67.871.000
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.909.400	-	-	28.909.400
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	250.000.000	-	-	250.000.000
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.395.000	6.450.000	15,21	35.945.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	11.076.758.369	173.370.247	1,57	10.903.388.122
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	10.724.163.094	112.119.247	1,05	10.612.043.847
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	-	-	25.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	302.595.275	61.251.000	20,24	241.344.275
10	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	25.000.000	-	-	25.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	80.000.000	-	0,00	80.000.000
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	50.000.000	-	0,00	50.000.000
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	30.000.000	-	-	30.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Jumlah Dokumen	10.524.800	-	0,00	-

	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	5.262.400	-	-	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	5.262.400	-	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	200.000.000	155.016.338	77,51	44.983.662
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	25.000.000	24.802.140	99,21	197.860
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	75.000.000	71.115.500	94,82	3.884.500
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	59.098.698	59,10	40.901.302
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.612.680.000	3.328.872.194	92,14	283.807.806
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100.000.000	99.639.976	99,64	360.024
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	150.000.000	148.337.400	98,89	1.662.600
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100.000.000	95.360.000	95,36	4.640.000
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	150.000.000	142.207.000	94,80	7.793.000
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	79.000.000	77.917.060	98,63	1.082.940
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	315.000.000	282.839.450	89,79	32.160.550
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material	80.000.000	79.226.750	99,03	773.250
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	400.000.000	385.569.558	96,39	14.430.442
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	266.000.000	264.775.000	99,54	1.225.000

21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1.972.680.000	1.753.000.000	88,86	219.680.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	4.032.008.459	3.936.860.000	97,64	348.366.490
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.032.008.459	3.936.860.000	97,64	95.148.459
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	5.350.037.154	5.180.050.493	96,82	348.366.490
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.956.847.990	3.808.000.497	96,24	148.847.493
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1.393.189.164	1.372.049.996	98,48	21.139.168
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7.339.665.250	7.073.379.538	96,37	348.366.490
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	465.000.000	445.281.350	95,76	19.718.650
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	285.000.000	258.160.000	90,58	26.840.000
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	6.589.665.250	6.369.938.188	96,67	219.727.062
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase Pengembangan Kepemudaan	14.988.540.000	14.139.272.975	94,33	849.267.025
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Persentase Pembinaan Kepemudaan	10.765.607.100	10.042.114.899	93,28	348.366.490
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Yang Berdaya Saing	177.405.000	157.040.000	88,52	20.365.000
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	750.000.000	743.111.000	99,08	6.889.000

30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing	121.500.000	118.370.000	97,42	3.130.000
31	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang Terpenuhi Haknya	969.273.000	947.995.160	97,80	21.277.840
32	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Untuk menjadi POLRI dan TNI	1.814.916.000	1.807.293.900	99,58	7.622.100
33	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan	5.943.000.100	5.398.627.839	90,84	544.372.261
34	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	338.960.000	274.460.000	80,97	64.500.000
35	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Meningkatkan Daya Saingnya	650.553.000	595.217.000	91,49	55.336.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	4.222.932.900	4.097.158.076	97,02	348.366.490
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pemberdayaan Melalui Dunia Usaha	2.239.969.000	2.224.540.112	99,31	15.428.888
37	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.982.963.900	1.872.617.964	94,44	110.345.936
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	53.079.916.085	49.921.386.914	94,05	3.158.529.171

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	13.568.308.100	12.818.949.175	94,48	348.366.490
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Peserta Pemberdayaan dan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	150.000.000	140.317.800	93,55	9.682.200
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	13.418.308.100	12.678.631.375	94,49	739.676.725
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	2.585.000.000	2.488.254.054	96,26	348.366.490
40	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan	600.000.000	535.308.900	89,22	64.691.100
41	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pekan Olahraga Yang diselenggarakan	750.000.000	722.019.500	96,27	27.980.500
42	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Event Olahraga yang diikuti	1.235.000.000	1.230.925.654	99,67	4.074.346
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	10.668.691.985	10.162.635.498	95,26	348.366.490
43	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Olahragawan Berbakat Yang Lulus Menjadi Atlet Daerah	304.956.550	270.680.700	88,76	34.275.850
44	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pelatih dan atlet pelajar yang dibina	3.045.043.450	2.636.549.034	86,58	408.494.416
45	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi	400.000.000	350.037.400	87,51	49.962.600
46	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet dan Organisasi Olahraga Yang Menerima Penghargaan	6.911.371.985	6.898.048.364	99,81	13.323.621
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan	7.320.000	7.320.000	100,00	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	17.207.916.000	16.629.162.122	96,64	348.366.490
48	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang Difasilitasi	8.550.000.000	8.015.656.543	93,75	534.343.457

49	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan	8.657.916.000	8.613.505.579	99,49	44.410.421
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	9.050.000.000	7.822.386.065	86,44	348.366.490
50	Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi	3.500.000.000	3.126.887.200	89,34	373.112.800
51	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah Olahraga Rekreasi yang Diberdayakan	750.000.000	536.125.000	71,48	213.875.000
52	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Masyarakat Yang Tersedia	400.000.000	367.096.000	91,77	32.904.000
53	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	4.300.000.000	3.706.733.065	86,20	593.266.935
54	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional	100.000.000	85.544.800	85,54	14.455.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Cakupan pembinaan kepramukaan	4.278.263.900	4.105.562.114	95,96	172.701.786
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	4.278.263.900	4.105.562.114	95,96	348.366.490
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Elektronik Yang Tersedia	200.000.000	194.416.700	97,21	5.583.300
56	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan	100.000.000	98.724.500	98,72	1.275.500
57	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	100.000.000	99.799.900	99,80	200.100
58	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapras Pelatihan Kegiatan Kepramukaan	100.000.000	98.764.844	98,76	1.235.156
59	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan Daerah	700.000.000	683.681.575	97,67	16.318.425
60	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	2.478.263.900	2.339.037.188	94,38	139.226.712
61	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Terpelihara	100.000.000	91.211.700	91,21	8.788.300

	Kepramukaan Tingkat Daerah					
62	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan per Tahun	500.000.000	499.925.707	99,99	74.293
	JUMLAH		104.797.739.617	88.097.250.358	84,06	16.700.489.259

Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 8%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh instruksi presiden nomor 2 tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 rata-rata sebesar 134% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 91.54% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 261%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 247.7%. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 310.3%. (Sangat Tinggi).
- 5) Capaian Kinerja dengan Indikator tambahan sebesar 102% (sangat tinggi).

Capaian kinerja tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya (2024) capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar 129 atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 5%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Pengendalian dan Evaluasi yang dituangkan dalam dokumen LKJiP berdasar pada penjabaran yang dituangkan dalam Renja, RKA dan Renstra harus disesuaikan dengan pencapaian kinerja sebagai bukti bahan pelaporan guna perbaikan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- 2) Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara garis besar, kedepan diharapkan program kegiatan mampu mengakomodir pengelolaan manajemen pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disusun serta anggaran kas yang ditetapkan;
- 4) Optimalisasi kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS

AJI ALI HUSNI AB., S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197606061998031008

